

## Peranan Implementasi Kebijakan Karantina Ikan dalam Pembangunan Perikanan Berkelanjutan

Bazar Ristiyawan<sup>1\*</sup>, Sutrisno Anggoro<sup>2</sup> dan Bambang Yulianto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

<sup>2</sup>Staf Edukatif Program Doktor Manajemen Sumberdaya Pantai, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

<sup>3</sup> Staf Edukatif Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

\*Email: ristiyawan@yahoo.com

### ABSTRACT

*Increased utilization of fishery biological resources, and the increasing traffic of fishery commodities both between countries as well as domestic, have the opportunity to increase the risk of the spread of fish diseases. In the development of marine and fisheries, fish quarantine has a strategic role in relation to the fishery commodities traffic, because one side is expected to fish quarantine as the first filter for the entry of fishery commodities so as to ensure the quality and safety of fish for each fishery products.*

*Development of fish quarantine needs to be done in a focused and sustained implementation of quarantine in order to run optimally supported among others by the facilities and infrastructure, human resources, techniques and methods as well as the ability quarantine fish diseases (HPIK) diagnosis in accordance with national and international standards. In addition, the successful implementation of fish quarantine is also determined by the institutional and regulatory powerful, as well as community participation. Based on the fact above, it can be used to discuss a problem, how to fish quarantine policy role in achieving sustainable development?*

*Method in this research is more focused on the review of the literature by using specification descriptive research based on qualitative.*

*Principles of quarantine policies in line with the principles of natural resource sustainability of fisheries, particularly to conservation through preventive and active control of the HPIK. By taking a role in supporting the principle of ecological sustainability, socio-economic sustainability, community sustainability. For the institutional sustainability where one of the factors supporting the institution of quarantine legislation, is recommended refisi on regulation, by reason of the lack of a deterrent effect against violators of quarantine regulations and institutional development of quarantine.*

**Keywords:** Policy, Fish Quarantine, Sustainable Development.

### 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan FAO *Year Book* 2009, Produksi perikanan tangkap Indonesia sampai dengan tahun 2007 berada pada peringkat ke-3 dunia dengan tingkat produksi perikanan tangkap pada periode 2003-2007 mengalami kenaikan rata-rata produksi sebesar 1,54%. Disamping itu, Indonesia juga merupakan produsen perikanan budidaya pada urutan ke-4 di dunia, sampai dengan tahun 2007 posisi produksi dengan kenaikan rata-rata produksi pertahun sejak 2003 mencapai 8,79%. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi penghasil produk perikanan terbesar dunia, karena terus meningkatnya kontribusi produk perikanan Indonesia di dunia pada periode 2004-2009. Menurut Daryanto (2007), sumberdaya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumberdaya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa pertama, Indonesia memiliki sumberdaya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. Kedua, Industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Ketiga, Industri perikanan berbasis sumberdaya nasional atau dikenal dengan istilah *national resources based industries*, dan keempat Indonesia memiliki keunggulan (*comparative advantage*) yang tinggi di sektor perikanan sebagaimana dicerminkan dari potensi sumberdaya yang ada.

Mengingat sangat besar manfaat ikan bagi masyarakat, maka perlu dilakukan upaya kelestariannya. Ikan merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui, artinya jika pengelolaan sumberdaya perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, maka ketersediaan protein hewani juga akan stabil. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian penting adalah aspek penyakit. Penyakit yang sulit ditanggulangi tentu akan mengancam kelestarian sumberdaya perikanan. Prinsip pengobatan terhadap penyakit bukan lagi merupakan salah satu hal utama yang harus dilakukan. Kecenderungan prinsip dalam bidang kesehatan sekarang telah bergeser menjadi prinsip pencegahan terhadap penyakit. Oleh karena itu, perlu diperkuat sistem pertahanan untuk mencegah masuknya penyakit-penyakit ikan yang belum pernah ada di Indonesia (penyakit eksotik) dan tersebarnya penyakit ikan dari suatu area ke area lain. Wabah penyakit sedang semakin diakui sebagai hambatan yang signifikan untuk produksi perikanan budidaya dan perdagangan dan mempengaruhi pembangunan ekonomi sektor di banyak negara di dunia. Penyakit sekarang dianggap sebagai salah satu faktor pembatas dalam budidaya, yang menimbulkan efek langsung pada kerugian ekonomi,

dan pengaruh secara tidak langsung yaitu pada aspek sosial dan aspek lainnya, seperti masalah perdagangan dan ketenagakerjaan, penggunaan bahan kimia dan obat-obatan, dan biaya lingkungan, tidak pernah benar diukur (FAO, 1997).

Potensi pemanfaatan sumberdaya hayati ikan Indonesia yang besar, dan semakin meningkatnya lalulintas komoditas perikanan baik antar negara maupun antar area didalam wilayah Negara Republik Indonesia, memiliki peluang terhadap meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), baik yang berasal dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hal tersebut dapat mengancam kelestarian sumberdaya hayati ikan Indonesia, dan menurunkan tingkat produksi budidaya ikan, sehingga pada akhirnya dapat merugikan perekonomian nasional. Oleh karena itu tindakan pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya HPIK perlu dilakukan melalui tindakan karantina ikan pada media pembawa/produk perikanan yang dilalulintaskan. Hal sependapat diungkapkan oleh Arthur, J.R. et al (2008) Karantina adalah tindakan manajemen risiko yang penting dan kegiatan utama yang harus dipertimbangkan ketika mengembangkan strategi nasional untuk manajemen kesehatan hewan akuatik. Hal ini juga dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan *biosecurity* di tingkat produksi. Penyakit ikan merupakan akibat dari serangkaian variabel kompleks yaitu variabel dari inang, patogen, dan lingkungan. Sedangkan ikan liar umumnya dipandang sebagai relatif bebas dari penyakit, penyakit ikan merupakan salah satu komponen yang memiliki pengaruh penting pada ekosistem perairan (Hedrick R.P., 1998).

Pembangunan karantina ikan merupakan bagian integral dari pembangunan kelautan dan perikanan yang merupakan penggerak dan pilar pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan karantina ikan bertujuan antara lain untuk meningkatkan sistem perkarantinaan ikan nasional yang komprehensif, prospektif dan kompatibel.

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, karantina ikan mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam hubungannya dengan lalulintas komoditas perikanan, karena disatu sisi karantina ikan diharapkan mampu sebagai filter pertama bagi masuknya komoditas perikanan impor atau pemasukan dari area asal, dan di lain pihak harus mampu menjamin mutu dan kesehatan ikan bagi produk perikanan Indonesia yang akan di ekspor atau dikeluarkan ke area tujuan.

Pembangunan karantina ikan perlu dilakukan secara terarah dan berkesinambungan agar pelaksanaan kegiatan karantina ikan dapat berjalan dengan optimal yang didukung antara lain oleh sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, teknik dan metoda serta kemampuan diagnosis HPIK yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan karantina ikan juga ditentukan oleh kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang kuat, serta peran serta masyarakat. Berdasarkan pada kenyataan diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, bagaimana peranan kebijakan karantina ikan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan?

## 2. METODOLOGI

Metode yang dipilih dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kajian literatur dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang mendasarkan pada deskriptif kualitatif. Alasan penggunaan deskriptif kualitatif adalah supaya dapat memperoleh gambaran dan menganalisa tentang kebijakan perkarantinaan ikan terutama dalam pengendalian hama dan penyakit ikan karantina terhadap pembangunan perikanan berkelanjutan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Karantina Ikan

Karantina Ikan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan serta Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, Karantina Ikan menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

1. Mencegah masuknya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Mencegah tersebarnya HPIK dari satu area ke area lain dalam wilayah Republik Indonesia.
3. Mencegah keluarnya Hama dan Penyakit Ikan (HPI) dari wilayah Republik Indonesia sesuai dengan persyaratan negara penerima/ tujuan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karantina ikan mengemban visi mewujudkan Karantina ikan modern yang tangguh, profesional dan terpercaya. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan diemban adalah sebagai berikut:

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati perikanan;
2. Meningkatkan daya saing komoditas perikanan di pasar internasional dan pasar dalam negeri;
3. Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat;
4. Mendorong partisipasi pada masyarakat dalam penyelenggaraan karantina ikan.

### 3.2. Peranan Kebijakan Karantina Ikan dalam Pembangunan Perikanan Berkelanjutan

Untuk mengkaji peranan karantina ikan dalam pembangunan perikanan berkelanjutan, aspek-aspek yang dikaji sebagaimana telah pendapat Charles (2001) yang berpandangan bahwa pembangunan perikanan yang berkelanjutan

haruslah mengakomodasi tiga paradigma yaitu konservasi (biologi), paradigma rasionalisasi (ekonomi) dan paradigma sosial/komunitas. Oleh karena itu, konsep pembangunan perikanan yang berkelanjutan sendiri mengandung aspek:

- Ecological sustainability* (keberlanjutan ekologi). Pandangan ini menjelaskan bahwa memelihara keberlanjutan stok/biomassa sehinggatidakmelewatinya daya dukungnya serta meningkatkan kapasitas dan kualitas dari ekosistem menjadi perhatian utama;
- Socioeconomic sustainability* (keberlanjutan sosio-ekonomi). Konsep ini mengandung makna bahwa pembangunan perikanan harus memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan pelaku perikanan pada tingkat individu. Dengan kata lain, mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi merupakan perhatian kerangka keberlanjutan ini;
- Community sustainability*, mengandung makna bahwa keberlanjutan kesejahteraan dari sisi komunitas atau masyarakat haruslah menjadi perhatian pembangunan perikanan yang berkelanjutan;
- Institutional sustainability* (keberlanjutan kelembagaan). Dalam kerangka ini, keberlanjutan kelembagaan yang menyangkut pemeliharaan aspek finansial dan administrasi yang sehat merupakan prasyarat ketiga pembangunan berkelanjutan di atas.

### 3.1.1. *Ecological sustainability*

Berdasarkan tugas dan fungsi karantina ikan yaitu menjaga masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) secara ekologi sangat menentukan terhadap kualitas maupun kuantitas sumberdaya ikan, hal ini terutama berkaitan dengan upaya preventif terhadap tersebarnya penyakit ikan. Hal tersebut disebabkan karena akibat yang ditimbulkan oleh hama dan penyakit ikan terhadap organisme ikan yang hidup di perairan budidaya maupun perairan bebas akan mempengaruhi tingkat kesehatan ikan dan dapat mengakibatkan kematian, apabila dalam kondisi yang lebih luas maka akan terjadi epidemi penyakit yang mengakibatkan kematian masal bahkan dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati. Pendapat yang sama dinyatakan oleh Smith K.F. *et al* (2009) yaitu Peningkatan perubahan lingkungan, termasuk hilangnya habitat, perubahan iklim dan eksploitasi yang berlebihan, telah secara langsung terkait dengan hilangnya keanekaragaman hayati global. Namun demikian adanya bukti substansial, yang menunjukkan bahwa penyakit dapat sangat mempengaruhi populasi spesies lokal dengan menyebabkan penurunan sementara atau permanen dalam kelimpahan. Lebih penting lagi, patogen dapat berinteraksi dengan faktor-faktor pendorong lainnya, seperti hilangnya habitat, perubahan iklim, eksploitasi berlebihan, spesies invasif dan pencemaran lingkungan untuk berkontribusi pada kepunahan lokal dan global. Pengaruh penyakit tertentu yang berdampak pada kematian masal pada beberapa jenis ikan, dapat ditemukan pada beberapa kasus di Indonesia antara lain seperti terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Wabah Penyakit Ikan

No	Tempat	Waktu	Komoditas
1	Blitar, Jawa Timur	March 2002	Koi ( <i>Cyprinus carpio koi</i> ) Kematian 80-95%
2	Subang, Jawa Barat	April 2002	Common carp ( <i>Cyprinus carpio carpio</i> )
3	Sungai Citarum, Jawa Barat (Saguling, Cirata, Jatiluhur)	Mei – Juni 2001	Common carp ( <i>Cyprinus carpio carpio</i> )

Sumber: Sunarto Agus *et al* (2005)

Beberapa kasus wabah penyakit ikan pada tabel diatas untuk mengatasi penyebaran yang lebih luas, karantina ikan mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Pulau Jawa dan Bali sebagai kawasan karantina dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep 40/Men/2002 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep 55/Men/2004 tentang Penetapan Wilayah Sumatera sebagai kawasan karantina terhadap ikan mas dan koi. Dengan ditetapkannya sebagai kawasan karantina berdasarkan hasil pemantauan maka kawasan tersebut terdapat petunjuk terjadinya serangan suatu HPIK yang masih terbatas penyebarannya sehingga harus diisolasi dari kegiatan pemasukan atau pengeluaran media pembawa (produk perikanan) dari dan/atau ke dalam daerah tersebut untuk mencegah penyebarannya. Selama masih ditetapkan menjadi kawasan karantina dilakukan upaya pengendalian terhadap HPIK, apabila berdasarkan pemantauan wilayah tersebut dinyatakan telah dapat dikendalikan maka akan dilakukan pencabutan status kawasan karantina. Setelah dilakukan upaya pengendalian terhadap kawasan Pulau Jawa, Bali dan Sumatera dan HPIK dapat dikendalikan, berdasarkan Kepmen KP No. Kep 05/Men/2007 kawasan karantina Pulau Jawa dan Bali dicabut dan Kepmen KP No. Kep 06/Men/2007 kawasan karantina Pulau Sumatera dinyatakan dicabut.

Selain melaksanakan pengendalian masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran, upaya karantina ikan dalam meminimasi tingkat risiko yaitu dengan melaksanakan kegiatan monitoring terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan menyusun data penyakit ikan, inang dan sebarannya serta, sebagaimana pendapat Fe`vre Eric M. *et al* (2006) yang menyatakan bagian dari upaya mengurangi risiko penyebaran penyakit ikan perlu adanya daftar patogen, inang, dan risiko kemungkinan munculnya, dan informasi harus tersedia untuk umum.

Pokok-pokok kebijakan karantina ikan sejalan dengan prinsip-prinsip kelestarian sumberdaya alam terutama sumberdaya perikanan, terutama terhadap upaya konservasi preventif. Menurut Anggoro Sri (2005) karantina ikan memiliki tugas untuk memantau dan mengawasi lalu lintas ikan. Guna mencegah penyebaran penyakit ikan dari daerah wabah ke daerah bebas penyakit ikan Karantina. Pemantauan dan pengendalian potensi masuk dan tersebarnya HPIK dilakukan untuk melindungi kelestarian dan industri sumberdaya perikanan, karena masalah penyakit sudah menjadi masalah serius di Indonesia. Dengan ikut berperan dalam menjaga sumberdaya alam agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi pada saat ini dan akan tetap terjaga sampai generasi yang akan datang, maka telah ikut mewujudkan prinsip pembangunan keberlanjutan.

### 3.1.2. *Socioeconomic sustainability*

Dampak yang ditimbulkan akibat adanya serangan penyakit pada budidaya ikan mengakibatkan kerugian secara ekonomi, sependapat dengan pernyataan tersebut menurut Subasinghe *et al* (1997) menyatakan dalam era dimana pertumbuhan perikanan budidaya di atas 10% per tahun dan kerugian akibat jumlah penyakit hingga miliaran dolar di seluruh dunia, di Asia-Pasifik selama dekade terakhir beberapa penyakit *epizootics* telah melanda sebagian besar wilayah. Taura Syndrome hancur budidaya udang penaeid di Amerika Latin, sementara sejumlah bakteri patogen telah mengakibatkan kerusakan besar pada industri salmon global. Wabah penyakit ini telah mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar terhadap perikanan budidaya dan kehancuran total dari beberapa industri, dan telah mempengaruhi produksi dan pemasaran perikanan rakyat.

Tabel 2. Data Lalu Lintas Produk Perikanan

Jenis Lalu Lintas	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Domestik Keluar	1.984	5.593	109.001	121.223	148.087
Domestik Masuk	5.681	1.736	8.114	3.091	9.984
Ekspor	3.027	9.497	1.157	8.468	1.904
Impor	507	374	464	363	443
<b>Jumlah</b>	<b>141.199</b>	<b>167.200</b>	<b>188.736</b>	<b>193.145</b>	<b>210.418</b>

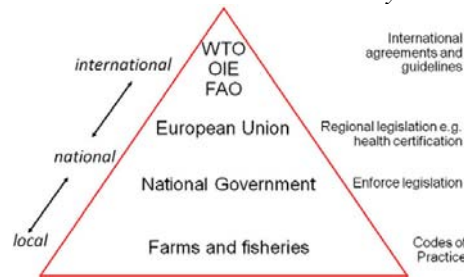
Sumber: Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2011

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah lalu lintas produk perikanan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan telah ada jaminan kesehatan ikan bahwa produk perikanan yang dilalu lintaskan telah terbebas dari hama dan penyakit ikan karantina atau tidak akan tersebarnya penyakit ikan ke area yang bebas hama dan penyakit ikan karantina. Melalui pengendalian HPIK serta didukung dengan penerapan prinsip karantina ikan yang baik pada unit usaha budidaya maka akan memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan komoditas perikanan yang akan merupakan salah satu faktor keberhasilan usaha budidaya. Hal ini dapat meningkatkan hasil budidaya baik dari kuantitas maupun kualitas, dan akan memberikan keuntungan pada pelaku usaha perikanan budidaya. Selain itu peningkatan frekuensi lalu lintas produk perikanan dimungkinkan karena semakin meningkatnya unit usaha pembudidaya ikan secara kuantitas yang secara tidak langsung berdampak sosial terutama dapat menyerap tenaga kerja sehingga akan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

### 3.1.3. *Community sustainability*

Pembangunan perikanan berkelanjutan keberhasilannya melibatkan semua pihak baik dari pemerintah, akademisi maupun pengusaha. Salah satu faktor penting dalam pembangunan perikanan berkelanjutan adalah pengendalian penyebaran penyakit ikan antara lain melalui penerapan prinsip-prinsip *biosecurity*. Upaya pengendalian penyakit terutama melalui penerapan *biosecurity* dilaksanakan dari level internasional, nasional sampai pada unit usaha budidaya, peran dari komunitas budidaya penting sebagai unit paling dasar dengan dalam piramida *biosecurity*. Pendapat yang sama dinyatakan Oidtmann B.C. *et al* (2011) Strategi *biosekuriti* yang efektif memberikan perlindungan terhadap populasi hewan air baik budidaya ataupun ikan di perairan bebas dengan meminimalkan risiko dari penyebaran penyakit. Strategi *biosekuriti* meliputi level internasional dan nasional untuk kesehatan hewan akuatik. Peran Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE) sebagai organisasi acuan bagi pengembangan standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional hewan dan produk hewan untuk diimplementasikan di berbagai negara. Di tingkat nasional, peran dari pihak yang berwenang, instrumen untuk mencegah masuknya penyakit eksotis dan membatasi dampak dari penyakit endemik. Di tingkat petani, penerapan standar yang tersedia dan penerapan prinsip *biosekuriti* di unit usaha budidaya.

Gambar 1. Piramida Biosecurity



Sumber: Oidtmann *et al*(2011)

Keberlanjutan komunitas dalam hal ini menuntut kesadaran pihak pengusaha untuk berperan serta dalam ikut serta mengendalikan penyakit ikan terutama di unit usaha pembudidaya ikan dengan bekerjasama dengan pemerintah, upaya pemberdayaan masyarakat pengusahanya oleh karantina ikan yaitu melalui sertifikasi pada unit usaha perikanan budidaya yang telah menerapkan praktik karantina ikan yang baik.

Tabel 3. Unit Usaha Pembudidaya Ikan (UUPI) yang Tersertifikasi

No.	Tahun	Jumlah UUPI
1	2011	2
2	2012	21
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>

Sumber: Puskari (2012)

Unit usaha pembudidaya ikan (UUPI) yang telah tersertifikasi mengalami peningkatan mulai awal penetapan kebijakan sampai tahun 2012. Peningkatan tersebut dimungkinkan kesadaran pengusaha dalam menerapkan prinsip-prinsip *Biosecurity* dan praktik karantina ikan yang baik sebagai upaya mengendalikan penyebaran penyakit pada unit usaha pembudidaya ikan. Usaha budidaya perikanan dalam prakteknya akan melibatkan banyak pihak, baik itu mulai dari usaha penyedia benih, penyuplai pakan, pemasaran hasil produksi. Untuk dapat menjalankan usaha budidaya maka peran antar komunitas usaha perikanan sangat menentukan dan sangat berkaitan satu dengan yang lain. Jaminan kesehatan ikan harus dapat diterapkan mulai dari hulu sampai hilir, dengan produk perikanan yang mempunyai jaminan kesehatan ikan yang dikeluarkan oleh Karantina Ikan maka dari faktor kesehatan ikan akan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau komunitas usaha perikanan mulai dari penyedia benih, pakan, budidaya dan pemasaran. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kesadaran pelaku usaha budidaya dalam menerapkan prinsip cara karantina ikan yang baik serta penerapan *biosecurity* pada unit usaha budidaya.

### 3.1.4. Institutional sustainability

Dukungan kelembagaan untuk melindungi sumberdaya perikanan terutama dari upaya pengendalian hama dan penyakit ikan sangat dibutuhkan. Salah satu faktor penting dalam suatu lembaga atau institusi adalah adanya payung hukum terhadap kebijakan yang akan diterapkan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kebijakan karantina ikan secara garis besar terdiri dari kegiatan operasional dan kegiatan pengawasan, untuk keberhasilan implementasi suatu kebijakan maka keduanya harus berjalan beriringan. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut berpedoman pada regulasi yang ada baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah serta aturan turunannya. Kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar apabila pihak pengguna jasa (pengusaha) dan petugas karantina ikan semua mengacu pada ketentuan yang ada, namun dalam implementasi kegiatan pengawasan di lapangan masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jasa terhadap ketentuan perkarantinaan ikan.

Tabel 4. Data Pelanggaran

JENIS LALU LINTAS	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
DomestikMasuk	54	40	16	24	30
DomestikKeluar	7	22	21	29	8
Impor	15	6	11	13	47
Ekspor	2	-	1	6	6
<b>JUMLAH</b>	<b>78</b>	<b>68</b>	<b>49</b>	<b>72</b>	<b>91</b>

Sumber: Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2011

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah total pelanggaran terhadap ketentuan perkarantinaan meningkat dari tahun 2009 sampai tahun 2011, hal ini dimungkinkan kurangnya efek jera yang terhadap pelaku pelanggaran karena sanksi yang dikenakan baik yang bersifat administratif ataupun pidana. Tingkat pelanggaran ketentuan perkarantinaan akan memperbesar risiko tersebarnya HPIK.

Karantina di Indonesia yang pada awal berdirinya berada pada satu lembaga Badan Karantina Pertanian dibawah Departemen Pertanian yang terdiri dari karantina ikan, karantina hewan dan karantina tumbuhan. Sejalan dengan perkembangan organisasi dan sejak terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan maka karantina ikan secara kelembagaan berada di bawah Departemen Kelautan dan Perikanan.

Dengan tingkat pelanggaran yang kecenderungan meningkat serta perubahan organisasi karantina ikan, maka perlu kiranya melihat kembali undang-undang yang mendasari karantina ikan dan disesuaikan dengan perkembangan kelembagaan serta dirumuskan sanksi atau ancaman hukuman yang lebih membuat efek jera bagi pelaku agar pelaksanaan penegakan hukum lebih optimal dan dapat mengurangi tingkat pelanggaran terhadap kebijakan kebijakan karantina ikan.

#### 4. KESIMPULAN

Pokok-pokok kebijakan karantina ikan sejalan dengan prinsip-prinsip kelestarian sumberdaya alam perikanan, terutama terhadap upaya konservasi melalui upaya preventif dan pengendalian terhadap HPIK. Dengan ikut berperan dalam menjaga sumberdaya alam agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi pada saat ini dan akan tetap terjaga sampai generasi yang akan datang, maka telah ikut mewujudkan salah satu prinsip pembangunan keberlanjutan yaitu keadilan antar generasi dan memenuhi prinsip keberlanjutan ekologi. Selain itu pelaksanaan kebijakan karantina ikan juga mendukung keberlanjutan sosio-ekonomi dengan semakin meningkatnya produk perikanan yang telah dijamin karantina ikan dari kesehatan ikan yang berdampak pada peningkatan sektor ekonomi dan serta secara tidak langsung dapat menyerap tenaga kerja. Melalui sertifikasi unit usaha pembudidaya ikan karantina ikan berperan dalam keberlanjutan komunitas antara lain melalui pemberdayaan masyarakat perikanan dalam upaya pengendalian HPIK terutama melalui penerapan *biosecurity* dan praktik karantina ikan yang baik di unit usaha budidaya. Dalam keberlanjutan kelembagaan, salah satu faktor yang mendukung kelembagaan karantina ikan yaitu perundang-undangan disarankan perlu dilakukan refisi terhadap undang-undang, dengan alasan kurangnya efek jera terhadap pelaku pelanggaran ketentuan karantina ikan dan perkembangan kelembagaan karantina ikan.

#### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PUSBINDIKLATREN BAPPENAS atas bantuan pembiayaan pendidikan dan Badan Karantina Ikan, Pengenda Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, atas izin yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan.

#### 5. REFERENSI

- Anggoro Sri, 2005. Peranan Karantina Ikan dalam Mencegah Penyebaran Koi Herpes Virus (KHV) di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu-ilmu Perikanan dan Budidaya Perairan* Vol. 3, No. 1. Hal. 59-62.
- Arthur J.R., Bondad-Reantaso M.G., Subasinghe R.P., 2008. Procedures for the quarantine of live aquatic animals: a manual. *FAO Fisheries Technical Paper*. No. 502. Rome, FAO. 2008. 74p.
- Charles Anthony T., 2001. *Sustainable Fishery Systems*. Blackwell Science. London, UK.
- Daryanto, Arief, 2007. Dari Klaster Menuju Peningkatan Daya Saing Industri Perikanan. *Buletin Craby & Starky*, Edisi Januari 2007.
- Fe`vre Eric M., Bronsvoort Barend M. de C., Hamilton Katie A. and Cleaveland Sarah, 2006. Animal movements and the spread of infectious diseases. *TRENDS in Microbiology* Vol.14 No.3. Hal. 125-131.
- Food and Agriculture Organization, 1997. Review of the state of world aquaculture. *Inland Water Resources and Aquaculture Service, Fishery Resources Division FAO Fisheries Circular*. No. 886, Rev.1. Rome, FAO. 1997. 163 p.
- Food and Agriculture Organization, 2009. *FAO Statistical Yearbook 2009*. Statistics Division FAO. <http://www.fao.org/docrep/014/am079m/PDF/am079m00a.pdf> (Diakses tanggal 21 Oktober 2012)

- Minchin Dan, 2007. Aquaculture and transport in a changing environment: Overlap and links in the spread of alien biota. *Marine Pollution Bulletin* Vol 55. Hal. 302–313.
- Oidtmann B.C., Thrush M.A., Denham K.L., Peeler E.J. 2011. *Review International and national biosecurity strategies in aquatic animal health*. *Aquaculture* Vol. 320. Hal. 22–33.
- Smith K. F., Acevedo-Whitehouse K.&Pedersen A. B., 2009. *The role of infectious diseases in biological conservation*. *Animal Conservation* Vol. 12. Hal. 1–12.
- Subasinghe, R.P. and J.R. Arthur. 1997. Introducing AAPQIS: the FAO's Aquatic Animal Pathogen and Quarantine Information System. *FAO Aquaculture Newsletter* Vol. 16. Hal. 3-6.
- Sunarto, A., Taukhid, A. Rukyani, I. Koesharyani, H. Supriyadi, L. Gardenia, H. Huminto, D.R/ Agungpriyono, F.H. Pasaribu, D. Herdikiawan, D. Rukmono and B. Prayitno. 2005. Field investigations on a serious disease outbreak among Koi and common carp (*Cyprinus carpio*) in Indonesia. *Diseases in Asian Aquaculture* Vol. V. Hal. 125-135.